

Judul : Sinyal Kuat Pansus Lemahkan KPK
Tanggal : Jumat, 25 Agustus 2017
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 1-7

Sinyal Kuat Pansus Lemahkan KPK

Tiga Parpol Tolak Revisi UU

Kamis (24/8).

JAKARTA-Tiga partai politik (parpol) memberi isyarat bahwa ada gejala 'tidak sehat' pada misi Pansus Hak Angket KPK. Gejala 'tidak sehat' dimaksud bermuara pada pelemahan KPK, yakni merevisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana penuntutan mati dihilangkan, SP3 mau dikeluarkan serta pelucutan sejumlah hak-hak KPK dalam pemberantasan korupsi.

Melihat gejala ini, tiga Parpol dengan tegas akan menolak jika Pansus Hak Angket KPK mengeluarkan rekomendasi untuk merevisi Undang-Undang (UU) KPK tersebut. Ketiga Parpol dimaksud yakni, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

"Partai Gerindra DPR RI menilai wacana revisi UU KPK tidak komprehensif," ungkap Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan,

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu menegaskan, Gerindra sejak awal tidak ingin ada

pelemahan KPK. Alasan itu pula yang membuat Gerindra menarik diri dari keanggotaan Pansus Angket KPK. "Buat Gerindra, kami dari awal menjauhkan pikiran dari upaya melemahkan KPK," tandasnya.

Menurut Muzani, jangan sampai wacana yang berkembang di luar mengganggu kinerja komisi antirasuah

dalam penindakan korupsi ■

► Baca **Sinyal...** Hal 7

"Kita sudah teriak Pak Jokowi mbok ya bekerja merapikan fraksi-fraksi pendukung. Kan fraksinya pendukung pemerintah semua. Kalau tak dirapikan belum tentu bola bisa dihentikan"

MARDANI ALI SERA

Sinyal Kuat Pansus Lemahkan KPK

Sambungan dari hal 1

"KPK harus tetap melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk menyelamatkan uang negara," jelasnya.

Dia juga menilai, UU KPK yang ada sekarang masih bisa dipertahankan untuk memberantas dan mencegah korupsi. Sehingga, revisi tidak mendesak untuk dilakukan. "Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kalau kemudian kesimpulan melemahkan jangan itu dilakukan," imbuhnya.

Senada Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Dia memprediksi, rekomendasi final Pansus Hak Angket KPK akan mengarah ke revisi UU KPK. Meskipun sejauh ini sejumlah pimpinan pansus masih menge-lak. "Masinton (Wakil Ketua Pansus KPK, red) masih bilang nggak ada kok, kesimpulan pansus tak akan mengarah pada revisi UU KPK. Tapi teman yang lain katakan akan mengarah ke rekomendasi, ya bisa ke UU KPK. Kita akan hadang itu," ujarnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (24/8).

Ia menambahkan, Pansus KPK meski-pun dituding cacat, juga sudah menjadi

produk hukum lantaran dketok di pa-ripurna. Adapun hasil dari pansus ini juga akan disampaikan dalam paripurna. "Jadi dia akan keluaran rekomen-dasi. Ini hak angket loh, tinggal selang-kah ke menyatakan pendapat, impeach-ment atau apa. Jadi kuat posisi DPR. Kita melihat prosesnya aja dari bagai-mana manggil pihak-pihak yang dirugi-kan KPK, sehingga kesimpulannya su-dah kelihatan ke arah mana," kata Mardani.

Ia pun meminta agar Presiden Jokowi segera berkoordinasi dengan fraksi pen-dukung pemerintahannya. Sebab anggota pansus hak angket KPK me-mang didominasi fraksi pendukung pemerintah.

"Kita sudah teriak Pak Jokowi mbok ya bekerja merapikan fraksi-fraksi pen-duktung. Kan fraksinya pendukung peme-rintah semua. Kalau tak dirapikan belum tentu bola bisa dihentikan. Karena kalau prosesnya masuk ke pari-purna, menang lagi, saya sudah hi-tung-hitung. Kita kalah," kata Mardani.

Menurutnya, Presiden Jokowi jangan katakan tak bisa mencampuri urusan di DPR. Sebab, memang prosesnya saja yang berjalan di DPR. Tapi hal ini diang-gap sebagai proses politik yang dijalan-

kan orang-orang politik. Sehingga Jokowi bisa mendiskusikannya.

"UU KPK masih sangat cukup. Jangan buka kotak pandora. Penuntutan mau dihilangkan, SP3 mau dikeluarkan. Macam-macam. Hak-hak KPK mau di-lucuti. Habislah. Sekarang saja diserang habis," urai Mardani.

Lebih lanjut, Mardani juga menang-gapi soal usulan agar Jokowi menerbit-kan Perppu KPK. "Pasti kita tolak Perppu nya. Buat saya itu bunuh diri Pak Jokowi kalau buat Perppu untuk revisi UU KPK. Pasti akan kita tolak," tegasnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto juga meng-atakan, Partai Demokrat tidak ber-tanggung jawab atas apapun yang dip-utuskan Pansus Hak Angket KPK nan-tinya. Partainya sejak awal konsisten menolak pembentukan Pansus Angket KPK. "Sehingga, segala keputusan yang ada di pansus, Partai Demokrat tidak bertanggung jawab," ucapnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (24/8).

Sejatinya, sambung Wakil Ketua DPR RI itu, partai berlambang mercy itu ti-dak mengikuti apapun perkembangan Pansus Angket KPK. "Kita juga harus

melihat apakah revisi UU KPK itu bisa menguatkan atau tidak. Tetapi bukan suatu keputusan daripada pansus," im-buhnya.

Diamini Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarif Hasan. "Ya kalau arahnya ke sana, harus jelas yang mau direvisi apa, jangan sampai revisi itu melemahkan," tukasnya dilokasi yang sama.

Sementara, Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Mulfachri Harahap mengaku, partainya men-duktung Presiden menerbitkan Perppu tentang KPK yang dilanjutkan dengan revisi UU KPK. "Catat baik-baik dan jangan dikurang-kurangkan ya. Sepan-jang itu ditujukan untuk memperbaiki strategi pemberantasan korupsi di ne-geri ini, saya kira PAN akan setuju," kata Mulfachri di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (24/8).

Sebab kata dia, tidak ada satupun Undang-undang di negeri ini yang tidak bisa direvisi. Contohnya, pasal dalam UUD 1945 pun bisa diamandemen. "Kecuali bagian yang sudah disepakati untuk tak diamandemen, soal bentuk negara dan pembukaan. Yang lain bisa direvisi. Apalagi cuma undang-undang itu," ucapnya. (aen)